



RSUD. LABUANG BAJI **Provinsi Sulawesi Selatan**



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) **RSUD LABUANG BAJI** **TAHUN ANGGARAN 2024**

Jalan Dr. Ratulangi No. 81 Makassar Telp. (0411) 872120 –873482 Fax. (0411) 830454
E-mail : rsulabuangbaji.perencanaan@gmail.com

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA-P SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 11	
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-P sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	23
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan	26
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	38
3.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja-PD..	39
3.3 Prioritas Perangkat Daerah	39
3.4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	51
BAB V PENUTUP	51

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 dapat disusun tepat waktu.

Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan merupakan acuan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Rencana Kerja Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan peraturan secara terperinci dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

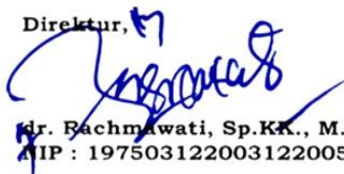
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini merupakan kegiatan rutin tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 yang telah disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta RENSTRA RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja merupakan dasar perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, acuan operasional, alat pengendalian dan dasar akuntabilitas. Rencana Kerja berisi tentang Latar Belakang, Maksud, Tujuan, Landasan Hukum, hubungan Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, isu-isu strategis, dan kebijakan serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 serta rencana pembiayaannya.

Kami berharap bahwa Rencana Kerja ini dapat mengantarkan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pelayanan kesehatan pada tahun 2024 untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dan Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat/Pasien.

Makassar, Agustus 2024

Direktur,



Dr. Bachmawati, Sp.KK., M.Kes.
NIP : 197503122003122005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana jangka Panjang Nasional (RJPN) tahun 2005-2025.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan, kemandirian, adil dan merata serta mengutamakan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut dan keluarga miskin.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui salah satu kebijakan dan agenda utama yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026 yakni Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan keberadaan RSUD Labuang Baji Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk mewujudkan Visi yang tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, yaitu "Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif,

Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2024 dimana terjemakan menjadi Provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Untuk mendukung Visi Sulawesi Selatan tersebut, maka RSUD Labuang Baji mempunyai visi “Menjadi Rumah Sakit Unggulan Provinsi yang Inovatif dan Kompetitif Tahun 2024” yang diharapkan bersinergi dan mendukung pencapaian target serta tujuan pembangunan, khususnya pembangunan sektor kesehatan di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Dalam penyusunannya Renja Perubahan Perangkat Daerah mengacu pada kerangka yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan juga tetap memperhatikan program prioritas agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan sehingga dapat memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

Renja Perubahan ini juga merupakan salah satu dokumen perencanaan yang merupakan acuan sekaligus hasil kesepakatan lanjutan bagi seluruh komponen RSUD Labuang Baji dalam menjalankan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024. Renja Perubahan ini juga mengacu pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang merupakan akumulasi dari seluruh Renja Perubahan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 86)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 13 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 42);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309).
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 2);

25. Visi Misi Gubernur Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam mewujudkan efisiensi dalam Pembangunan daerah.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

- a. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan serta Rencana Bisnis dan Anggaran Perubahan (RBA-P) Tahun Anggaran 2024;
- b. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan anggaran;
- c. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- d. Terciptanya pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- e. Memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2024 RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berisi tentang Penyusunan Renja RSUD Labuang Baji Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Memuat dasar regulasi sebagai acuan kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta garis besar isi dokumen.

- BAB II HASIL EVALUASI RENJA-PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana-P Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Labuang Baji
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan RSUD Labuang Baji berdasarkan indikator kinerja
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Labuang Baji.
 - 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan.
- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Tujuan dan sasaran Rencana Perangkat Daerah
 - 3.2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja-PD Tahun 2024
 - 3.3. Prioritas Perangkat daerah
 - 3.4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA RSUD LABUANG BAJI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan maka dalam pelaksanaan diperlukan suatu indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan agar dapat melakukan perbaikan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam Renstra dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan.

Evaluasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melampaui target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra-PD; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tahun 2024 merupakan periode awal dari pelaksanaan Renstra RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024-2026. Adapun hasil pelaksanaan Renja RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel sampai dengan triwulan II Tahun 2024, dengan pagu pendanaan pada Renja Tahun 2024 sebesar Rp. 127.227.019.348,- yang dialokasikan untuk 3 (tiga) Program, 8 (Delapan) Kegiatan dan 19 (Sembilan belas) Sub Kegiatan, diperoleh rata-rata capaian kinerja program sebesar 36,89%, rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 12,56% dan rata-rata capaian kinerja sub kegiatan sebesar 4,08%, yang secara rinci sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel s/d Triwulan II Tahun 2024

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PADA TAHUN 2024- 2026	REALISASI TARGET HASIL KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN s/d TAHUN (2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2024			TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN/SUB KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA s/d TRIWULAN II TAHUN 2024			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET RENJA	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	REALISASI RENJA	TINGKAT REALISASI (%)	Rp.	REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/6*100	11	12	13= 12/4*100	10	
Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji						175.838.344.157,0	127.227.019.378,0			38.572.352.462,0				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	%	87,05			153.878.606.244,0	76.157.630.804,0	39.66	50	32.969.115.275,0	39.66	45.5	UPT RSUD Labuang Baji	
	Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	Nilai	91,47					82,96	40,0		48.2	40,0		43.7
	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	Nilai	101,43					100,42	60,0		59.7	60,0		59.15
	Persentase peningkatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	%	15,16					10,20	5,0		49.0	5,0		32.98

Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	39,0			13,0	334.500.000,0	236.249.800,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6,0			2,0	175.000.000,0	117.264.400,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3,0			1,0	65.000.000,0	53.466.800,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3,0			1,0	75.000.000,0	53.198.700,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3,0			1,0	5.000.000,0	3.146.700,0	0,0		0,0	0,0	0,0

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3,0			1,0	5.000.000,0	3.195.800,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12,0			4,0	6.000.000,0	2.652.000,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9,0			3,0	3.500.000,0	3.325.400,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	24,0			8,0	74.924.106.244,0	59.679.500,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	3,0			1,0	18.500.000,0	11.864.800,0	0,0		0,0	0,0	0,0

	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3,0			1,0	4.000.000,0	1.934.700,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3,0			1,0	4.000.000,0	41.492.500,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	9,0			3,0	29.000.000,0	4.387.500,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat	Laporan	12,0			4,0	644.000.000,0	54.179.000,0	0,0		0,0	0,0	0,0

	Daerah												
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12,0			4,0	4.000.000,0	8.289.000,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	9,0			2,0	100.000.000,0	45.890.000,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah tamu yang difasilitasi	Orang	105,0			30,0	310.000.000,0	234.749.500,0	1,0	3.33	8.383.201,0	1,0	0,9
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	105,0			30,0	310.000.000,0	234.749.500,0	1,0	3.33	8.383.201,0	1,0	0,9
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	36,0			12,0	5.100.000.000,0	4.536.773.004,0	3,0	2.5	1.677.750.295,0	7,0	19,4
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Laporan	36,0			12,0	5.100.000.000,0	4.536.773.004,0	3,0	2.5	1.677.750.295,0	6,0	16,6

	Umum Kantor yang Disediakan												
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah orang yang dilayani melalui BLUD	Orang	171.000,0			54.000,0	71.036.000.000,0	71.036.000.000,0	15.600,0	28,8	31.282.981.779,0	29.100,0	17,01
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	3,0			1,0	71.036.000.000,0	71.036.000.000,0	1,0	100	31.282.981.779,0	2,0	66,6
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS Dalam Kondisi Baik	%	100,0			100,0	21.409.737.913,0	50.566.911.774,0	10,0	10	5.542.037.187,0	10,0	10
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di RSUD LABUAG BAJI	%	100,0			100,0	20.309.737.913,0	50.566.911.774,0	20,0	20	5.542.037.187,0	20,0	20
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	150,0			50,0	17.059.737.913,0	46.236.305.000,0	1,0	2,0	1.850.000.000,0	1,0	0,66

Pengadaan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	170,0			50,0	1.500.000.000,0	4.330.606.774,0	40,0	80	3.692.037.187,0	40,0	23,52	
<i>Predikat Kinerja</i>														
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang bersertifikasi	%	85,0			75,0	550.000.000,0	502.476.800,0	10,0	13,3	61.200.000,0	10,0	11,76	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	%	100,0			100,0	500.000.000,0	502.476.800,0	10,0	10	61.200.000,0	10,0	10	
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	700,0			200,0	500.000.000,0	502.476.800,0	15,0	7,5	61.200.000,0	15,0	2,14	
<i>Predikat Kinerja</i>														

Secara rinci, Tabel 2.1 berisi target dan realisasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Renja UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel serta pencapaian Renstra UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun pada kolom 5 tidak terisi dikarenakan perbedaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang masih menggunakan acuan Perubahan Renstra UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2018-2023.

Pada Tahun 2024, UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel melaksanakan 3 (tiga) program dengan 6 (enam) indikator program. Rata-rata capaian kinerja program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar 36,89%, dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

Hasil evaluasi pelaksanaan renja dan capaian kinerja renja Tahun 2024 UPT RSUD Labuang Baji dengan 3 program yaitu :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki 4 (empat) indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 49,50%
 - Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti
Target indikator kinerja pada renja yaitu 79,32% dengan capaian kinerja sebesar 45,5%
 - Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah
Target kinerja pada renja yaitu 82,96% dengan capaian kinerja sebesar 43,7%
 - Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah
Target kinerja pada renja yaitu 100,42% dengan capaian kinerja sebesar 59,15%
 - Persentase peningkatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Target kinerja pada renja yaitu 100,42 dengan capaian kinerja sebesar 32,98.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat memiliki 1(satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 10 %
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia memiliki 1(satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 13.33 %

Faktor-faktor penyebab pencapaian kegiatan yang memenuhi target kinerja, yaitu:

1. Komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja;
2. Koordinasi yang efektif, kerjasama dan komunikasi antara antar bidang pada UPT RSUD Labuang Baji, serta seluruh stakeholder yang terkait.
3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai;

Sesuai dengan hasil evaluasi Renja UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, program/ kegiatan/sub kegiatan dengan tingkat realisasi kinerja masih dibawah 50% secara umum disebabkan oleh program (outcome) maupun kegiatan/sub kegiatan (output) akan dilaksanakan/dicapai pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2024, sehingga diharapkan bahwa capaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024 akan tetap selaras dengan target capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang tertuang dalam Renstra UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024-2026.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilaksanakan terhadap hal tersebut diatas adalah:

1. Perlu adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan dalam memahami aturan-aturan yang baru pada saat pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
2. Diperlukan tindak lanjut terhadap kendala teknis yang terjadi pada proses pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi; dan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel didasarkan pada kajian evaluasi pencapaian kinerja pelayanan sesuai indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024-2026. Untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan serta mencapai tujuan UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel, maka telah ditetapkan sasaran kinerja yang merupakan pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel, dengan indikator kinerja sebagai suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Pengukuran target kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

UPT RSUD Labuang Baji telah melaksanakan tugas sebagai UPT yang mempunyai tugas menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Pasal 34 ayat (3) "Negara bertanggung jawab atas. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah Rumah Sakit Umum Daerah.

Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik, pelayanan asuhan keperawatan serta pelayanan rujukan dalam bentuk pelayanan kesehatan kepada pasien rawat inap dan rawat jalan. Pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah adalah pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi pelayanan: kuratif (pengobatan), preventif (upaya pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk, tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur, sejak pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia.

1. Cakupan pasien yang tertangani di Rumah Sakit

Pasien tertangani adalah pasien yang datang kerumah sakit yang mendapat pelayanan, baik pelayanan IGD, rawat jalan, rawat inap dan layanan penunjang lainnya dari rumah sakit.

Tabel 2.2

Jumlah Kunjungan Rawat jalan Berdasarkan Jenis Kunjungan

PENGUNJUNG	CAPAIAN	
	2022	2023
Baru	9.940	14.245
Lama	30.256	38.664
Total	40.196	52.909
Rata2/Hari	152	201

SUMBER DATA :Laporan Rekam Medik TA.2022-2024

Pada tabel diatas pengunjung baru terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2023, dibandingkan pada tahun 2022. Begitupun juga pengunjung lama meningkat pada tahun 2023.

Tabel 1.2

Jumlah Kunjungan Rawat Inap

PENGUNJUNG	2022	2023
Pasien masuk	8834	9826
Pasien keluar hidup	8230	9219
Pasien mati < 48 jam	149	189
Pasien > 48 jam	312	356

SUMBER DATA :Laporan Rekam Medik TA.2022-2023

Dari tabel diatas jumlah pasien masuk dan pasien keluar hidup meningkat untuk pelayanan rawat inap dari tahun ke tahun. Untuk NDR (Net Death Rate) yang merupakan indikator yang menggambarkan mutu pelayanan di rumah sakit dianggap masih dapat ditoleransi.

Tabel 2.3

Jumlah Capaian Indikator Rawat Inap

NO	INDIKATOR	STANDAR (Depkes 2005)	JUMLAH CAPAIAN	
			2022	2023
1	BOR	60-85%	53.1	62.02
2	LOS	6-9 hari	4.68	4.67
3	BTO	40-50 kali	43.65	48.82
4	TOI	1-3 hari	3.92	2.84
5	NDR	25/1000	36.313	36.46
6	GDR	45/1000	53.492	55.82

SUMBER DATA :Laporan Rekam Medik TA.2022-2023

Pada tabel 1.3 diatas menunjukkan BOR dan BTO menunjukkan perbaikan yang signifikan dari tahun 2022 sampai 2023, LOS berada dibawah standar, yang menunjukkan efisiensi tinggi dalam perawatan atau masalah terkait pengelolaan pasien. TOI berada dalam rentang standar. Secara keseluruhan meskipun beberapa indicator menunjukkan perbaikan tetapi ada beberapa area seperti NDR dan GDR yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk mencapai standar.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 secara umum baik dengan memperhatikan indikator pencapaian sasaran kinerja pelayanan, kinerja pelayanan publik dan keuangan sekaligus merupakan indikator keberhasilan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Berikut ini isu-isu penting dan strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga dokter subspesialis dan konsultan pada keahlian tertentu sehingga jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak maksimal;
2. Kondisi dan ketersediaan bangunan baik dari segi persyaratan teknis, luas dan kenyamanan saat ini belum seluruhnya sesuai dengan standar normatif rumah sakit kelas B, khususnya sarana dan lahan parkir;
3. Ketersediaan peralatan baik segi jumlah, jenis dan kualitas peralatan medis maupun peralatan non medis pada beberapa instalasi/unit masih menjadi permasalahan;
4. Sistem tata kelola rumah sakit masih belum berjalan secara optimal dikarenakan struktur, tupoksi, uraian jabatan dan uraian tugas masih terjadi tumpang tindih;
5. Mengembangkan produk layanan yang lebih bervariasi dikarenakan pergeseran gaya hidup dan semakin meningkatnya umur harapan hidup, angka kejadian penyakit seperti stroke, cancer, serta meningkatnya pasien geriatri menjadi peluang bagi rumah sakit untuk dapat mengembangkan layanan unggulan di bidang tersebut;
6. Perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat, teknologi dan informasi membuat masyarakat semakin memiliki tuntutan terhadap pelayanan kesehatan dengan kualitas yang lebih baik. Masyarakat semakin mengerti akan hak-haknya sebagai pasien, semakin mandiri dalam menentukan fasilitas pelayanan kesehatan yang akan digunakan;

7. Kehadiran Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan Perguruan Tinggi lainnya yang ada di kota Makassar menjadi peluang bagi rumah sakit dalam pemenuhan kebutuhan SDM ke depan, serta kerjasama dalam mewujudkan rumah sakit pendidikan provinsi;
8. Kemajuan teknologi informasi yang pesat menyebabkan rumah sakit perlu memperhatikan pentingnya **management information system**, agar informasi dan data yang begitu melimpah, dapat digunakan untuk meningkatkan nilai tambah dalam memberikan jasa layanan pasien dan masyarakat secara umum;
9. Semakin banyaknya fasilitas kesehatan baik rumah sakit, klinik dan dokter praktek menyebabkan persaingan dalam industri kesehatan di kota Makassar menjadi semakin kompetitif.

Pemasalahan tersebut di atas yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya layanan unggulan karena diperlukan dukungan dari unit penunjang untuk memperlancar layanan, hal ini terkait dengan sarana dan prasarana serta peralatan yang dibutuhkan;
2. Belum optimalnya sistem monitoring, evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan;
3. Belum optimalnya sistem integrasi layanan kesehatan, kaitannya dengan penelitian dan pengembangan;
4. Belum optimalnya sistem budaya kerja termasuk sistem pemberian reward dan Punishment;
5. Belum optimalnya SIM RS yang terkoneksi ke seluruh bagian/ Instalasi/ Unit yang ada di rumah sakit;
6. Pembayaran klaim dari pihak BPJS Kesehatan yang tidak lancar dan dibayar tidak sesuai dengan tagihan, hal ini mempengaruhi kondisi rumah sakit terutama perihal pembayaran dengan pihak distributor obat maupun pembayaran jasa pelayanan untuk tenaga di RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan baik oleh Rumah Sakit maupun pihak independen sudah mendapat nilai dalam kategori baik. Menurut hasil analisa survey, beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain kecepatan pelayanan, lama waktu tunggu pasien, alur pelayanan, dan beberapa hal terkait sarana penunjang dan kebersihan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

a. Tantangan

1. Semakin berkembangnya rumah sakit swasta lain yang menjadi pesaing bagi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit utamanya sebagai upaya menuju akreditasi versi SNARS;
3. Tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang prima.

b. Peluang

1. Meningkatnya pertumbuhan penduduk membuka pasar pelayanan kesehatan;
2. Muara Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat termasuk didalamnya pelayanan kesehatan;
3. Komitmen yang tinggi daerah dalam mewujudkan kesehatan gratis bagi masyarakat;
4. Semakin intensifnya pembangunan infrastruktur rumah sakit;
5. Semakin meningkatnya upaya peningkatan kesehatan dalam melindungi kepentingan masyarakat;
6. Semakin meningkatnya peran serta/partisipasi masyarakat dalam kegiatan peningkatan kesehatan;
7. Hubungan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya mewujudkan peningkatan pelayanan dan kemitraan dengan rumah sakit.

Formulasi isu-isu penting dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

1. Pemenuhan SDM terutama dokter sub spesialis;
2. Lebih pro aktif dalam upaya promosi rumah sakit;
3. Meningkatkan sarana prasarana dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
4. Memaksimalkan biaya diklat melalui APBD setiap tahun untuk meningkatkan kemampuan pegawai.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan telah disesuaikan dengan Perencanaan Kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2024, dapat dilihat pada tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum
Daerah Labuang Baji

Lembar
.....
dari
.....

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100 %	159.122.064.791,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100 %	79.996.683.652,00	
Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program			100 %	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program				100 %			
Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti			100 %	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti				100 %			
			Persentase Peningkatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	10,2				Persentase Peningkatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	10,2		
01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	352.500.000,00	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	-	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	180.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	-	

02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	70.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	80.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	

06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	-	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang	3 Laporan	4.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang	3 Laporan	-	
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 Laporan	77.479.564.791,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 Laporan	-	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600 Orang/Bulan	77.410.564.791,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600 Orang/Bulan	-	
02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	19.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	-	

03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	
04	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	6.000.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	29.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	-	
	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000,00	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Yang dikelola oleh Perangkat Daerah	2 Unit	35.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Yang dikelola oleh Perangkat Daerah	2 Unit	-	

01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4 Laporan	35.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4 Laporan	-	
04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	755.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	600.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	-	
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	5.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	-	
04	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	150.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	-	
05	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Tamu yang di Fasilitas	30 orang	350.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Tamu yang di Fasilitas	30 orang	-	
01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	350.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	-	

07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	25 Unit	1.400.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Unit	1.229.417.500,00	
01	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	1.400.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	-	
02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	650.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	100 Unit	1.229.417.500,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5.250.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78 Orang	2.257.682.952,00	
01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	5.250.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	78 Orang	2.257.682.952,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	600.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	bangunan kesehatan, 2 unur rehabilitasi ruang perawatan	3.429.583.200,00	

01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	600.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit bangunan kesehatan, 2 unsur rehabilitasi ruang perawatan	3.492.583.200,00	
09	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Dilayani melalui BLUD	-	72.900.000.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Dilayani melalui BLUD	1 Unit Kerja	73.080.000.000,00	
01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Makassar	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	72.900.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Makassar	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	73.080.000.000,00	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Makassar	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik	100%	18.112.677.219,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Makassar	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik	100%	19.824.760.664,00	
01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Makassar	Jumlah Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	-	17.012.677.219,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Makassar	Jumlah Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	367 unit	19.824.760.664,00	
01	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	1 Unit	750.000.000,00	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	1 Unit	-	

02	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan yang diadakan	10 Unit	13.212.677.219,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan yang diadakan	367 Unit	19.824.760.664,00	
03	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kota Makassar	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintanance yang disediakan dan dipelihara	5 Unit	300.000.000,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kota Makassar	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintanance yang disediakan dan dipelihara	5 Unit	-	
04	Pengadaan Obat Habis pakai, Bahan Medis habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Seprei,Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang disediakan	10 paket	750.000.000,00	Pengadaan Obat Habis pakai, Bahan Medis habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Seprei,Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang disediakan	10 paket	-	
05	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Sarana Fasilitas layanan Kesehatan Yang dipelihara	2 Unit	500.000.000,00	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Sarana Fasilitas layanan Kesehatan Yang dipelihara	2 Unit	-	
06	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan Yang dipelihara	2 Unit	500.000.000,00	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan Yang dipelihara	2 Unit	-	
07	Pengadaan Obat,Vaksin,Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Obat,Vaksin,Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	50 Paket	1.000.000.000,00	Pengadaan Obat,Vaksin,Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Obat,Vaksin,Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	50 Paket	-	

02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Makassar	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	100.000.000,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Makassar	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	
01	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	100.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	-	
03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah Dokumen Sistim Informasi Kesehatan	1 Dokumen	500.000.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah Dokumen Sistim Informasi Kesehatan	1 Dokumen	-	
01	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistim Informasi Kesehatan	1 Dokumen	500.000.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistim Informasi Kesehatan	1 Dokumen	-	
04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			-	500.000.000,00	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			-	-	
01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	250.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	-	

02	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	250.000.000,00	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	-	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang Bersertifikasi	100%	700.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang Bersertifikasi	100%	-	
01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			-	100.000.000,00	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			-	-	
01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes)	10 Orang	100.000.000,00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes)	10 Orang	-	
02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah pegawai RS yang mengikuti pengembangan kompetensi	60	600.000.000,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah pegawai RS yang mengikuti pengembangan kompetensi	60	-	

02	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	60 orang	600.000.000,00	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	60 orang	-	
JUMLAH					177.934.742.010,00					99.821.444.316,00	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan penunjang dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Fungsi rumah sakit merupakan pusat pelayanan rujukan medik spesialistik dan sub spesialistik dengan fungsi utama menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan (kuratif) dan Pemulihan (rehabilitasi pasien) (Depkes R.I. 1989) Maka sesuai dengan fungsi utamanya tersebut perlu pengaturan sedemikian rupa sehingga rumah sakit mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan berdaya guna dan berhasil guna.

Arah kebijakan bidang kesehatan tahun 2020 – 2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Kementerian Kesehatan RI memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu :

1. Penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit sesuai dengan SPM sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat dan diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang;
2. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM yang telah ditetapkan;
3. Penyediaan pelayanan jaminan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan mudah diakses.

Prioritas pembangunan nasional meliputi 11 yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dan 3 prioritas lainnya. Prioritas tersebut dijabarkan ke dalam berbagai sasaran dan kebijakan.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT RSUD Labuang Baji dengan mempertimbangkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel maka ditetapkan tujuan dan sasaran Renja UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024 sebagai periode pertama dari turunan

penjabaran Renstra UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 yang akan dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun, sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja	
					Pokok	Perubahan
Tujuan RPD : Mengoptimalkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel						
Sasaran RPD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah						
Indikator Sasaran RPD : Nilai SAKIP Provinsi						
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja program RSUD Labuang Baji	persen	100	100
2.	Meningkatnya mutu pelayanan pasien	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit	Tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR)	Persen	65%	65%
			Rata-rata lamanya pasien dirawat (AVLOS)	Hari	5 hari	5 hari
			Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI)	Hari	3 hari	3 hari
			Frekuensi pemakaian tempat tidur pasien (BTO)	Kali	40 kali	40 kali
			Angka kematian kasar (GDR)	Per 1000	45/1000	45/1000
			Angka Kematian Setelah dirawat (NDR)	Per 1000	30/1000	30/1000

Pada tabel 3.1 menunjukkan target indikator dan sasaran masih merujuk pada target indikator dan sasaran tahun 2023 .Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja-PD Tahun 2024.Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 yang mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Kesehatan dan menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah. Dalam perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, terdapat beberapa pertimbangan yang diperhatikan oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel, yaitu:

1. Mepedomani Renstra UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024-2026
 2. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan mampu merespons isu-isu penting UPT RSUD Labuang Baji Prov.Sulsel
 3. Pencapaian SPM Rumah Sakit
- 3.2. Prioritas Perangkat Daerah

Prioritas pendanaan UPT RSUD Labuang baji Prov. Sulsel Tahun 2024 memperhatikan Renstra UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024-2026, Pencapaian Program dan Kegiatan UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2023 dan mengakomodir isu-isu strategis yang dapat dicapai dengan melakukan koordinasi terhadap perencana serta

mengarahkan prioritas penganggaran UPT RSUD Labuang Baji Tahun 2024. Adapun Rencana Kerja Prioritas Perangkat Daerah UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Prioritas UPT RSUD Labuang Baji Prov.SulSel yang Mendukung Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target		Pagu Anggaran		Bertambah/Berkurang	Sumber Dana		
					Pokok	Perubahan	Pokok	Perubahan				
1	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100 %	100 %	76.157.630.804	85.820.268.610				
				Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	100 %	100 %						
				Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100 %	100 %					9.662.637.806	
				Persentase Peningkatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	10,2	10,2						
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 dok	13 dok	236.249.800	74.222.800	-	162.027.000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	117.264.400	0	-	117.264.400	APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	53.466.800	5.514.500	-	162.027.000	APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	53.198.700	53.198.700	-	117.264.400	APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	3.146.700	3.146.700	-	47.952.300	APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	3.195.800	5.874.500		2.678.700	APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	2.652.000	3.163.000		511.000	APBD	

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3.325.400	3.325.400	-	APBD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6	6	59.679.500	58.908.200	- 771.300	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	11.864.800	11.864.800	-	APBD
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	1.934.700	1.934.700	-	APBD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	41.492.500	41.492.500	-	APBD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3	4.387.500	3.616.200	- 771.300	APBD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6	6	54.179.000	70.365.000	16.186.000	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	4	8.289.000	8.289.000	-	APBD
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	2	45.890.000	62.076.000	16.186.000	APBD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tamu Yang difasilitasi	30	30	234.749.500	234.225.500	- 524.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	30	234.749.500	234.225.500	- 524.000	APBD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	4.536.773.004	3.661.395.174	- 875.377.830	APBD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	4.536.773.004	3.661.395.174	- 875.377.830	APBD
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	71.036.000.000	81.721.151.936	10.685.151.936	APBD

			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	71.036.000.000	81.721.151.936	10.685.151.936	APBD
			PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik	100	100	15.874.734.774	50.624.819.764	34.750.084.990	
			enyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	100	100	15.874.734.774	50.624.819.764	34.750.084.990	
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	50	50	11.544.128.000	46.193.919.000	34.649.791.000	DAU/DAK
			Pengadaan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	50	50	4.330.606.774	4.430.900.764	100.293.990	DBCHT
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	200	200	428.676.800	502.476.800	73.800.000	
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pegawai Rumah Sakit yang mengikuti pengembangan kompetensi	200	200	428.676.800	502.476.800	73.800.000	APBD
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	200	200	428.676.800	502.476.800	73.800.000	APBD

3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Perumusan Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 dirancang untuk mewujudkan capaian Renstra UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 yang mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah serta untuk pemenuhan pelayanan kesehatan di UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel dalam menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan. Pada Tahun 2024, rencana kerja pokok UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel terdiri dari 3 (tiga) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan dengan total pagu pendanaan sebesar Rp. 92,461,042,378- . Rencana Kerja Perubahan 3 (tiga). Adapun pagu indikatifnya sebesar Rp. 85,820,268,610,- Berkurang dari pagu pokok karena adanya efisiensi anggaran. yang secara rinci pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Perubahan Renja UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024

No	Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
				Target 2024		Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang	Lokasi		Sumber Dana	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	RKPD-P		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100 %	100 %	76.157.630.804	85.820.268.610	9.662.637.806				
			Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	100 %	100 %							
			Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100 %	100 %							
			Persentase Peningkatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	10,2	10,2							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 dok	13 dok	236.249.800	74.222.800	- 162.027.000				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	117.264.400	0	- 117.264.400	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji	APBD	APBD

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	53.466.800	5.514.500	-	162.027.000	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji	APBD	APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	53.198.700	53.198.700	-	117.264.400	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji	APBD	APBD
		Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	3.146.700	3.146.700	-	47.952.300	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji	APBD	APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	3.195.800	5.874.500		2.678.700	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji	APBD	APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	2.652.000	3.163.000		511.000	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji	APBD	APBD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3.325.400	3.325.400		-	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji	APBD	APBD

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6	6	59.679.500	58.908.200	-	771.300	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	11.864.800	11.864.800		-	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji	APBD	APBD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	1.934.700	1.934.700		-	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji	APBD	APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	41.492.500	41.492.500		-	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji	APBD	APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3	4.387.500	3.616.200	-	771.300	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji	APBD	APBD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6	6	54.179.000	70.365.000		16.186.000	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji		

		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	4	8.289.000	8.289.000	-	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji	APBD	APBD
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	2	45.890.000	62.076.000	16.186.000	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji	APBD	APBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tamu Yang difasilitasi	30	30	234.749.500	234.225.500	- 524.000	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	30	234.749.500	234.225.500	- 524.000	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji	APBD	APBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	4.536.773.004	3.661.395.174	- 875.377.830	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji	APBD	APBD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	4.536.773.004	3.661.395.174	- 875.377.830	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji	APBD	APBD
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	71.036.000.000	81.721.151.936	10.685.151.936	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji	APBD	APBD
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	71.036.000.000	81.721.151.936	10.685.151.936	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji	APBD	APBD

		PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik	100	100	15.874.734.774	50.624.819.764	34.750.084.990	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji		
		enyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	100	100	15.874.734.774	50.624.819.764	34.750.084.990	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji		
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	50	50	11.544.128.000	46.193.919.000	34.649.791.000	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji	DAU/DAK	DAU/DAK
		Pengadaan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	50	50	4.330.606.774	4.430.900.764	100.293.990	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji	DBCHT	DBCHT
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	200	200	428.676.800	502.476.800	73.800.000	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji		
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pegawai Rumah Sakit yang mengikuti pengembangan kompetensi	200	200	428.676.800	502.476.800	73.800.000	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji	APBD	APBD

		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	200	200	428.676.800	502.476.800	73.800.000	UPT RSUD LabuangBaji	UPT RSUD LabuangBaji	APBD	APBD
--	--	--	---	-----	-----	-------------	-------------	------------	----------------------	----------------------	------	------

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta target kinerja, lokasi dan pagu indikatifnya. Penyusunan Perubahan Renja dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan Perangkat Daerah. Selain itu penyusunan Perubahan Renja UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024 sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi capaian kinerja UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel dalam prioritas pembangunan daerah, serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Catatan Penting

- a. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator Perubahan Renja UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian dalam dokumen RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.
- b. Penyusunan Renja UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024 berpedoman pada Renstra UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 dan RKPD Perubahan Prov. Sulsel Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan dokumen Perubahan Renja UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh pejabat dan staf UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel secara bersama-sama mempunyai kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaiknya sesuai dengan tugas dan kewenangan.
- b. Perubahan Renja UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024 akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Tahun 2024 dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2024 sebelum

ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024.

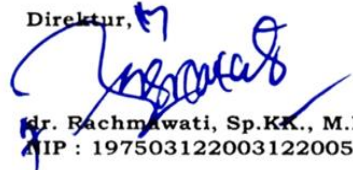
3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024 adalah perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap hasil pelaksanaan pada triwulan III dan triwulan IV Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2024. Serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait terutama untuk memudahkan akses masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan guna terselenggaranya upaya kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu kepada masyarakat sebagaimana tujuan pembangunan di bidang kesehatan yakni tercapainya hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.

Makassar, Agustus 2024

Direktur,



Dr. Fachmawati, Sp.KK., M.Kes.
NIP : 197503122003122005